

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

PERUSAHAAN

(Studi Kasus Pada PT.PLN DistribusiTakalar)

FACHRUL ASWANDI

105730433113



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus
pada PT. PLN Distribusi Makassar)

Nama Mahasiswa : FACHRUL ASWANDI
NIM : 10573 04331 13
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 09 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
NIDN: 0925086302

Muttiarni, S.E., M.Si.
NIDN: 0930087503


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasidong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.
NBM: 107 3428


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **FACHRUL ASWANDI**, NIM: **10573 04331 13**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019, tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 Jumadil Akhir 1440 H
Makassar, 09 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji
 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
 2. Linda Arisanti Razak, S.E., M.Si. Ak. 
 3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA. 
 4. Naidah, S.E., M.Si. 

Disahkan Oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar




Ismail Rasulong, S.E., M.M.
 NIM: 903078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	9
B. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	16
C. Penelitian Terdahulu	30
D. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tempat dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Metode Analisis Data	36

F. Sistematika Penulisan.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39



I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu perusahaan yang berdiri tentunya memiliki suatu tujuan atas kegiatan yang dilakukannya baik untuk menghasilkan keuntungan maupun sebagai suatu bentuk pelayanan publik. Sehingga perusahaan berdiri bukan tanpa tujuan dan tanpa memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Keuntungan tersebut diperoleh sebagian besar dari hasil operasi perusahaan sehingga menghasilkan sejumlah pendapatan tertentu dengan ekspektasi laba tertentu. Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak. Pada perkembangannya banyak perusahaan yang hanya berfokus pada kegiatan operasi semata demi menghasilkan keuntungan yang besar dan bentuk akuntabilitas finansial demi memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder* perusahaan tersebut. Namun perlu disadari adanya dampak- dampak sosial yang akan ditimbulkan perusahaan dalam menjalankan operasinya tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada investor dan kreditur, juga kepada lingkungan sosial perusahaan.

Dampak-dampak operasi perusahaan seperti polusi, eksploitasi tenaga kerja dan sumber energi serta penggunaan energi yang tidak berwawasan lingkungan akan berpengaruh pada kehidupan sosial di sekitarnya. Sehingga kehidupan dan kesejahteraan lingkungan sosial perusahaan perlu diperhatikan. Karena kesadaran masyarakat terhadap dampak operasi perusahaan pada kondisi

sosialnya semakin penting dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.

Sebenarnya di Indonesia sendiri pengaturan terkait tanggung jawab sosial telah ada sejak lama, seperti telah adanya pembinaan usaha kecil oleh BUMN yang dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kemudian terbitnya keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya adanya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No. Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 2008 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta yang terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sehingga pada dasarnya telah banyak regulasi yang mengatur pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan terutama BUMN dan sudah selayaknya perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan kontribusinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disadari bahwa selain pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan saja seperti investor dan kreditur, terdapat pula pihak-pihak sosial yang juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan operasi perusahaan. Sehingga CSR begitu penting untuk dilakukan. Seperti yang disebutkan dalam Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2012, Rahmatullah (2012) menjelaskan alasan diterapkannya CSR adalah berdasarkan pertimbangan untuk (1) memenuhi regulasi, hukum dan aturan yang mengaturnya, (2) sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif, (3) bagian dari strategi bisnis perusahaan, (4) untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat, dan (5) bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Begitu pentingnya penerapan CSR di Indonesia dengan segala regulasi dan hukum yang mengaturnya tentu bukan tanpa suatu tanggung jawab atas penerapannya. Akuntabilitas perusahaan dalam penerapan CSR pun menjadi penting agar informasi keuangan terkait kegiatan CSR perusahaan menjadi transparan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 101 dan peraturan pemerintah no. 47 tahun

2012 bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Sehingga kesadaran suatu perusahaan akan pengungkapan tanggung jawab sosialnya menjadi penting, karena dengan demikian akan menunjukkan sejauh mana perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya..

Pembangunan ekonomi yang berkembang dengan cepat menuntut PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero untuk menyediakan tenaga listrik dalam berbagai kebutuhan industri, ekonomi, perdagangan, pemerintahan dan bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu BUMN, PT. PLN (Persero) yang kegiatan utamanya dalam penyediaan tenaga listrik tersebut tentunya rentan terhadap isu-isu maupun sentimen negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan.

Selain itu Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Hal demikian menuntut PT. PLN (Persero) untuk melakukan program-program tanggung jawab sosial.

Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. PLN (Persero) itu sendiri antara lain adalah *Community Relation*, *Community Services*, dan *Community Empowering* (www.pln.co.id). Kegiatan *community relation* merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait, misalnya kegiatan sosialisasi

instalasi listrik melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Berikutnya kegiatan *community services* yang merupakan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum, seperti bantuan bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN sebagai contoh di Kelurahan Asemrowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 150kV Sawahan-Waru, bantuan sarana air bersih, dan masih banyak lagi. Sedangkan kegiatan *community empowering* terdiri dari program- program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain, bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM, pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya, serta bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik di sekitar instalasi PLN.

Melihat luasnya operasi perusahaan yang orientasinya sebagai BUMN, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dengan beberapa program yang telah ditetapkan dan dijalankan, menjadi penting bagi PT. PLN (Persero) menerapkan *CSR Disclosure* (pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) yang baik, guna meredam sentimen negatif yang ada dalam masyarakat dan memperlancar operasional perusahaan serta tidak terjadi suatu ketimpangan hasil yang diperoleh. Dimana nantinya terbentuk suatu keseimbangan antara perolehan laba perusahaan yang sesuai dengan legitimasi positif sebagai

pengaruh (*outcome*) dari kegiatan pertanggungjawaban sosial yang telah diterapkan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, seperti penelitian Imelda (2016) yang dalam penelitiannya membahas pengaruh profitabilitas dan corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian tersebut disebutkan pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan pada profitabilitas dan tata kelola perusahaan laporan keuangan merupakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana Analisis perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial Perusahaan (Studi kasus pada PT. PLN Distribusi Takalar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan yang telah dipaparkan ,maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar?
3. Apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar telah melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?

C. Tujuan

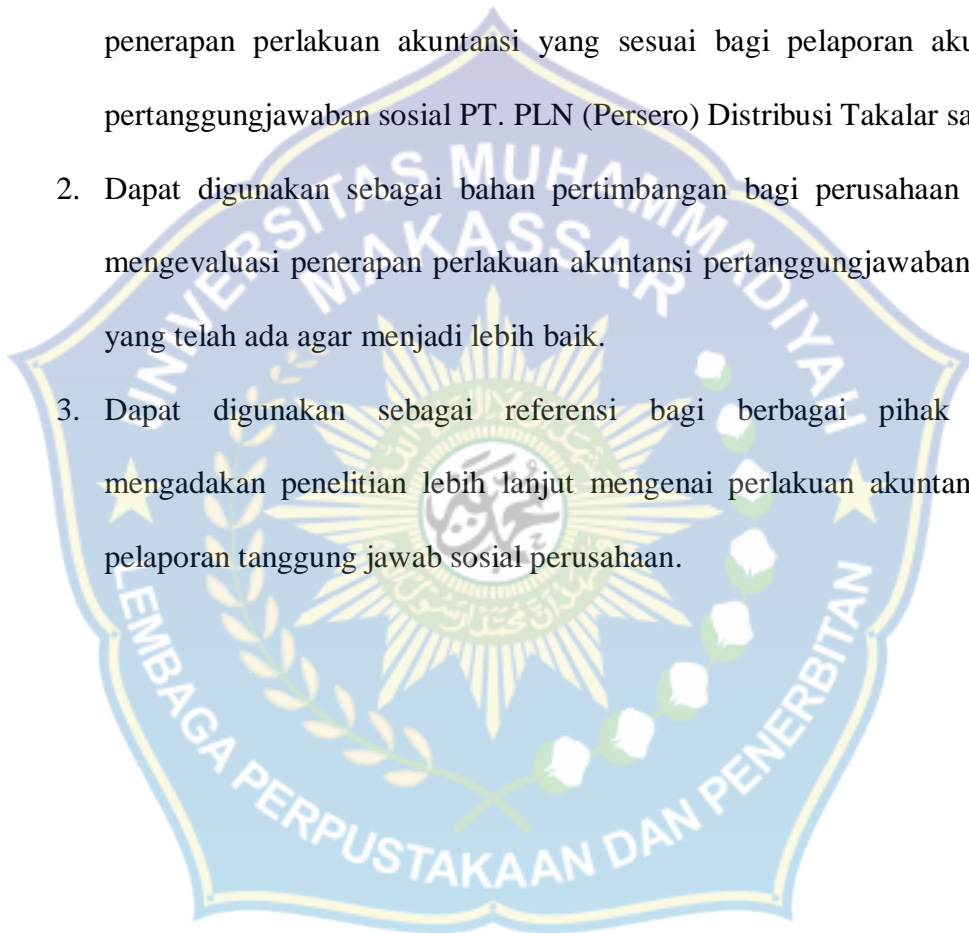
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bentuk program CSR yang di kelolah oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar.
2. Untuk menganalisis penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar.
3. Untuk menganalisis apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar telah melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami, menganalisa permasalahan yang ada serta memberikan usulan dalam penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai bagi pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar saat ini.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang telah ada agar menjadi lebih baik.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai pihak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam Paparan Kebijakan Kementerian BUMN tentang CSR tahun 2010 pada acara rapat koordinasi tentang Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha, Wasrin (2010) selaku Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan menyebutkan bahwa perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pertama kali muncul saat diterbitkannya buku karya Howard R Bowen yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953 yang selanjutnya Howard R Bowen dikenal sebagai Bapak CSR. CSR mulai berkembang pada tahun 1960 dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kemudian KTT Bumi (*earth summit*), tahun 1992 di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus dilakukan. Lalu *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep *Social Responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *Economic and Environment Sustainability*. Perkembangan berikutnya adalah rencana diberlakukannya sertifikasi ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* pada tahun 2010.

Banyak sekali prinsip-prinsip terkait CSR yang telah berkembang. Menurut Luhglatno (2007) *corporate social responsibility* adalah bentuk

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dijelaskan bahwa penerapan *corporate social responsibility* merupakan bentuk implementasi GCG (*good corporate governance*) perusahaan karena salah satu prinsip GCG adalah masalah tanggung jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) dalam Handayani (2008) definisi CSR adalah sebagai berikut :

"Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen terus menerus oleh bisnis agar etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup angkatan kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat luas."

Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal), dan masyarakat luas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dengan adanya regulasi terkait penerapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* bagi BUMN tersebut mengasumsikan betapa pentingnya praktek tanggung jawab sosial tersebut sehingga BUMN pun sebagai unit usaha milik negara pun juga dituntut menerapkan tanggung jawab sosial. Kewajiban diterapkannya tanggung jawab sosial bagi perusahaan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

2. Manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan

Menurut Suharto (2006) dalam Yentifa dan Handayani (2008) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan *Triple Bottom Line*, yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Masing-masing maksudnya adalah sebagai berikut:

a. *Profit*

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk terus beroperasi dan berkembang.

b. *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia
Akuntansi sebagai catatan historis.

c. *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan keragaman
hayati.

Sehingga dalam prakteknya fokus tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepada tiga hal tersebut (Yentifa dan Handayani, 2008). Dengan profitabilitas yang memadai, tentu perolehan laba menjadi hal yang utama dan penting karena laba merupakan salah satu alat ukur perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Pencapaian laba yang optimal akan menunjang operasional perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan. Perhatian kepada masyarakat pun menjadi hal yang tidak kalah penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kompetensi perlu dibuat. Selanjutnya partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkunganpun juga menjadi hal yang penting mengingat perusahaan telah memperoleh manfaat atas penggunaan lahan yang ada. Dengan pelestarian lingkungan, perusahaan berarti juga mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat kerusakan lingkungan dan juga mencegah adanya pembengkakan biaya untuk penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

Harahap (2005) dalam Luhgiatno (2007) mengemukakan beberapa alasan perlunya perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yaitu:

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.

Kotler dan Lee (2005) dalam Masnila (2006) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain:

- a. Meningkatkan penjualan dan *market share*
- b. Memperkuat *brand positioning*
- c. Meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan
- d. Meningkatkan kemampuan mempertahankan (*retain*) karyawan
- e. Menurunkan biaya operasional.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Kebijakan Perusahaan

Menurut Hasibuan (2004) dalam Handayati dan Laksiani (2008) tanggung jawab sosial perusahaan memiliki empat jenis tanggung jawab, yaitu yang bersifat ekonomis, artinya memperoleh laba bagi pemegang saham; legal, mematuhi peraturan dan hukum (berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya); etika atau *ethical* dimana perusahaan harus memenuhi kaidah-kaidah normatif seperti berlaku jujur, transparan, tidak ada diskriminasi ras atau gender dan tidak korupsi.

Tanggung jawab selanjutnya bersifat *discretionary*, yaitu tanggung jawab yang sebenarnya tidak harus dilakukan, tetapi atas kemauan sendiri Hamann dan Acutt (2008) dalam Handayati dan Laksiani (2008), menjelaskan terdapat dua motivasi yang mendasari diterimanya konsep CSR oleh kalangan bisnis. Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, *superficial*, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi kesan korporasi yang peduli terhadap kepentingan sosial. Realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya. Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa.

4. Teori Legitimasi

Deegan (2006) dalam Chariri dan Nugroho (2009) menyebutkan legitimasi merupakan hal yang penting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Sehingga

berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi. Organisasi berusaha memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan diakui (*legitimate*) oleh pihak luar, yaitu dengan cara perusahaan beroperasi sesuai batasan-batasan dan norma atau nilai yang berlaku. Perusahaan seharusnya sadar bahwa keberlangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Jadi perusahaan dapat kehilangan legitimasinya bila hubungannya dengan lingkungan sosialnya tidak baik dalam artian tidak sesuai dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang berikutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis adalah dengan dilakukannya pengungkapan informasi CSR.

5. Pengukuran Biaya *Corporate Social Responsibility*

Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai *social cost* dan *social benefit* (Luhglatno, 2007)

Zulfikar dalam Luhglatno (2008) mengusulkan beberapa teknik pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu.

- a. Penilaian pengganti (*surrogate valuation*). Jika nilai dari sesuatu tidak dapat secara langsung ditemukan, maka kita dapat menyetemikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang sedang diukur.

- b. Teknik survey (*survey techniques*). Survey dilakukan dengan mengobservasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dampak usaha dari perusahaan terkait bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang diinginkan. Dalam mengumpulkan informasi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang sedang diukur dalam dirinya. Kedua, responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke unit moneter baik secara langsung atau menggunakan nilai pengganti. Ketiga, reponden harus mau memberikan jawaban jujur.
- c. Biaya perbaikan dan pencegahan (*restoration or avoidance cost*). Pengukuran biaya dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.
- d. Penilaian (*appraisal*) oleh tim independen. Penaksiran yang dilakukan oleh pihak independen dalam menilai asset berwujud perusahaan.
- e. Putusan pengadilan (*court decisions*). Penilaian dan penghitungan atas kerusakan atau sejumlah biaya tertentu melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan sering menunjukkan nilai sosial.

B. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi dengan pelaporan keuangan sebagai produk utamanya diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap

lingkungan sosialnya (Winartie dan Sujono, 2004). Selanjutnya Luhglatno (2007) menjelaskan untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial perusahaan, entitas perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindaklanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak (*shareholders, stakeholders dan debtholders*).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial atau *Social Responsibility Accounting* oleh Ramanathan (Belkaoui, 2000) dalam Luhglatno (2007) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran; yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial berfokus untuk mencoba menunjukkan gambaran komprehensif aktivitas dan interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya, jadi dapat diketahui informasi tentang sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusinya baik positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Luhglatno, 2007).

Menurut Ramanathan dalam (Winartie dan Sujono, 2004) ada tiga tujuan dari akuntansi sosial, dua tujuan pertama berhubungan dengan proses pengukuran sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan proses pelaporan. Pertama, akuntansi sosial digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi

sosial bersih perusahaan setiap periode, yang tidak hanya meliputi sosial cost dan social benefit yang diinternalisasi perusahaan tetapi juga kenaikan dari dampak eksternal bagi berbagai segmen sosial yang berbeda. Kedua, untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang secara langsung mempengaruhi hubungan sumber daya dan status kekuasaan individu, komunitas, segmen sosial dan generasi adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas di satu sisi dan aspirasi legitimasi individu di sisi lainnya. Ketiga, memungkinkan cara yang optimal bagi perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, performa, dan kontribusi perusahaan terhadap tujuan sosial. Informasi yang relevan ini disajikan untuk pertanggungjawaban publik dan juga sebagai fasilitas dalam mengambil keputusan mengenai pilihan sosial serta alokasi sumber daya sosial.

2. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela (Henderson and Peirson, 1998 dalam Luhglatno,2007) antara lain.

- a. *International decision making*; manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.

b. *Product differentiation*; manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki inisiatif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.

c. *Enlightened self interest*; perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para *stakeholder* yang terdiri dari *stockholder*, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan,

hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi perusahaan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Sebenarnya telah ada dasar yang menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas hendaknya melaporkan bentuk laporan lain selain laporan keuangan utama. Dalam PSAK No. 1 Paragraf ke 12 (Revisi 2009) dinyatakan bahwa:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Regulasi terkait pelaporan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2c) yang mengatur Laporan Tahunan, dimana laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Indikator Penyajian Informasi dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Global Reporting Initiative, (2006) menjelaskan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemilik kepentingan baik internal maupun eksternal.

Tidak semua entitas memiliki pelaporan dalam bentuk dan cara yang sama. Pendekatan dalam melaporkan kegiatan entitas akan tergantung pada kombinasi pengendalian organisasi serta apakah pengungkapan berhubungan dengan kinerja operasi, kinerja manajemen, atau penggambaran informasi. Menentukan signifikansi sebuah entitas dalam pembuatan laporan atau dalam mempertimbangkan penambahan batasan akan sangat tergantung pada skala dari dampak keberlanjutannya. Entitas yang memiliki dampak signifikan biasanya menghasilkan risiko atau peluang yang lebih besar kepada organisasi atau pihak yang berkepentingan, dan karenanya menjadikan entitas tersebut sebagai entitas di mana organisasi harus bertanggung jawab atau akuntabel (Sumber : *GRI-Reporting Guidelines*, 2006).

Untuk membantu menentukan apa yang harus dilaporkan, bagian *principles and guidance* (panduan dan prinsip pelaporan) ini mencakup prinsip

dan pelaporan terkait materialitas, pelibatan pemilik kepentingan, konteks keberlanjutan dan kelengkapan laporan beserta seperangkat alat penguji singkat untuk setiap prinsip. Bagian *standard disclosure* berisi standar pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan berkelanjutan. *Global reporting initiative* mengidentifikasi informasi yang relevan dan material di kebanyakan organisasi serta kepentingan dari kebanyakan organisasi serta kepentingan dari pengungkapan.

- a. Strategi dan Profil: pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk dapat seperti strategi yang dimiliki profil dan tata kelola.
- b. Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana sebuah organisasi menggunakan topik tertentu untuk memberikan konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu
- c. Indikator Kinerja: Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.

Berikut merupakan uraian indikator unsur-unsur informasi yang perlu tersaji dalam pelaporan *sustainability report* tersebut berdasarkan GRI G3 (2011) – Comparison Sheet :

1. Pengertian Pihak Berelasi

a. Strategi dan Analisis (*Strategy and Analysis*)

- 1) Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya.

2) Deskripsi dampak, risiko dan peluang utama.

b. Profil Organisasi (*Organizational Profile*)

- 1) Nama organisasi
- 2) Merek, produk dan/atau jasa utama
- 3) Struktur organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (*operating companies*), anak perusahaan dan usaha patungan
- 4) Lokasi kantor pusat organisasi
- 5) Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.
- 6) Sifat kepemilikan dan bentuk legal.
- 7) Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).
- 8) Skala organisasi.
- 9) Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur dan kepemilikan.
- 10) Penghargaan yang diterima dalam periode laporan

c. Parameter Laporan (*Report Parameters*) Periode pelaporan

- 1) Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada)
- 2) Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya)

- 3) Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya
- 4) Proses dalam menetapkan isi laporan
- 5) Batasan laporan
- 6) Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan

d. Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan (*Governance, commitments and Engagement*) Struktur tata kelola organisasi

- 1) Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.
- 2) Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif
- 3) Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.
- 4) Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- 5) Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.
- 6) Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi,

lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.

- 7) Proses dalam mengevaluasi kinerja
- 8) Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan/atau organisasi advokasi nasional/internasional.
- 9) Daftar kelompok *stakeholder* yang dilibatkan oleh organisasi
- 10) Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih *stakeholder* yang akan dilibatkan Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan *stakeholder*, termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompoknya.

2. Indikator Kinerja (*Performance Indicators*)

a. Lingkungan (*Environmental*)

- 1) Aspek material
- 2) Aspek air
- 3) Aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati)
- 4) Aspek emisi, efluen, dan limbah
- 5) Aspek produk dan jasa
- 6) Aspek kepatuhan
- 7) Aspek pengangkutan/transportasi.

b. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

- 1) Aspek investasi dan pengadaan

- 2) Aspek non diskriminasi
- 3) Aspek kebebasan berserikat dan berkumpul
- 4) Aspek pekerja anak
- 5) Aspek kerja paksa dan kerja wajib
- 6) Aspek praktek/tindakan pengamanan
- 7) Aspek hak penduduk asli.

c. Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (*Labor Practices and Decent Work*)

- 1) Aspek ketenagakerjaan khusus untuk bidang dan utilitas tertentu
- 2) Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen
- 3) Aspek keselamatan dan kesehatan kerja
- 4) Aspek pelatihan dan pendidikan
- 5) Aspek keberagaman dan kesempatan setara

d. Masyarakat (*Society*)

- 1) Aspek keterbukaan terhadap masyarakat
- 2) Aspek rencana tanggap darurat
- 3) Aspek komunitas
- 4) Aspek korupsi
- 5) Aspek kebijakan public
- 6) Aspek kelakuan tidak bersaing

- 7) Aspek kepatuhan
- e. Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility*)
- 1) Aspek pengungkapan
 - 2) Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan
 - 3) Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa
 - 4) Aspek komunikasi pemasaran
 - 5) Aspek keleluasaan pribadi pelanggan
 - 6) Aspek kepatuhan
- f. Ekonomi (*Economic*)
- 1) Aspek kinerja ekonomi
 - 2) Aspek kehadiran pasar
 - 3) Aspek dampak ekonomi tidak langsung
 - 4) Aspek ketersediaan dan keandalan
 - 5) Aspek efisiensi system

3. Pendekatan Manajemen (*Management Approach*)

Berikut ini merupakan panduan dalam menetapkan batasan pelaporan informasi dalam *sustainability report* yang akan menentukan substansi laporan. Substansi laporan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kendali atas aktifitas terhadap entitas, ada atau tidaknya dampak signifikan dari aktifitas terhadap entitas, serta ada atau tidaknya pengaruh signifikan aktifitas terhadap entitas.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut akan menghasilkan bentuk laporan yang berupa data kinerja (*performance data*), pengungkapan berdasarkan pendekatan manajemen (*management approach*), serta pelaporan naratif (*narrative reporting*) seperti berikut:

- a. Sebuah laporan berkelanjutan harus memasukkan dalam batasannya semua entitas yang menghasilkan dampak signifikan bagi berkelanjutan (baik actual atau potensial).
- b. Entitas ini dapat dimasukkan dengan menggunakan baik indikator kinerja operasi, manajemen, atau dengan deskripsi naratif.
- c. Pada tingkat minimal, organisasi harus memasukkan entitas berikut dalam laporannya melalui pendekatan berikut:
 - Entitas dimana organisasi memiliki kendali harus tercakup oleh indikator Kinerja Operasi
 - Entitas dimana organisasi memiliki pengaruh signifikan harus tercakup dalam Pengungkapan Pendekatan Manajemen
- d. Batasan pengungkapan narasi harus memasukkan entitas dimana organisasi tidak memiliki kendali/pengaruh signifikan, tetapi memiliki keterkaitan dengan tantangan utama yang dihadapi organisasi karena dampak yang ditimbulkannya.

4. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PT. PLN (persero) selain sebagai perseroan yang bergerak dibidang bisnis penyedia tenaga listrik di Indonesia juga merupakan salah satu BUMN (badan usaha milik negara). Dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/2012 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Sehingga hal ini mengharuskan PT. PLN (Persero) melakukan tanggung jawab sosial serta melaporkannya.

Selain adanya regulasi berkenaan dengan keharusan dilaksanakannya program tanggung jawab sosial oleh BUMN dalam hal ini bernama Program Kemitraan dan Bina Sosial, pedoman akuntansinya pun telah diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi tahun 2012. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tujuan pedoman akuntansi PKBL ini merupakan pedoman bagi unit PKBL dalam rangka menyelenggarakan pencatatan atas transaksi program. Acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan unit PKBL menggunakan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Digunakannya dua acuan tersebut atas dasar

pertimbangan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dimaksudkan untuk digunakan oleh unit PKBL BUMN. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam SAK ETAP bahwa standar akuntansi tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dimana merupakan entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dalam hal ini entitas yang dimaksud adalah unit PKBL dan pengguna eksternal yang dimaksud adalah mitra PKBL terkait.

Adapun komponen laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE- 02/MBU/Wk/2012 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Aktivita
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya :

Ayu Puspitasari (2012). Meneliti tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar”. Metode yang digunakan analisis kuantitatif (deskriptif), penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer pusat pendapatan yang diterapkan telah efektif. Dengan

membandingkan antara anggaran dan aktualnya. Selain itu, struktur organisasi PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar telah menunjukkan adanya pemberian otoritas dan tanggung jawab yang mutlak dan absolut antara kepala bidang dengan bawahannya.

Anugerah (2010). Meneliti tentang “Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dimana ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Rahmawati (2015), meneliti tentang “Analisis akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. Vale Indonesia Tbk. Menggunakan data sekunder dimana pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan menggunakan indeks pengungkapan menunjukkan bahwa terdapat dalam penerapan pertanggungjawaban perusahaan.

Rizky (2013), meneliti tentang “penerapan audit dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pada koperasi di Jember. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data, dimana menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan yang diprosikan pada return on asset, return on equality.

Imelda (2016), meneliti tentang “pengaruh profitabilitas dan corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Menggunakan metode kualitatif dimana

penelitian ini pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan pada profitabilitas dan tata kelola perusahaan.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Raja(2011)	Pengaruh Karakteristik perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan yang Terdaftar Di BEI	Kuantitatif	Untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.
2.	Andi (2012)	Faktor-Faktor yang Mmpengaruhi Pengungkapan Corporate Responsibility	Kualitatif	Untuk menguji factor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggungjawab (CSR) pada laporan tahunan perusahaan.
3.	Dewi (2013)	Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Reaksi Investor pada Industri Pertambangan Dsar dan Kimia yang Go Pubic Di Bursa Efek Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan corporate social responsibility rterhadap reaksi investor serta yang diproksikan melalui volume perdagangan saham diluar normal.

4.	Yasin (2014)	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility	Kualitatif Deskriptif	Untuk menjalin hubungan timbale balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat
5.	Yola Sari Sartika (2013)	Factor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan high profil yang terdftar di BEI	Kualitatif	Menunjukkan bahwa factor-faktor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Uraian landasan teori diatas mengenai perlakuan Akuntantansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan pada PT. PLN Persero Takalar Maka dapat dijelaskan Dalam bentuk gambar ,Berikut adalah gambar kerangka fikir dalam penelitian ini.

PT. PLN PERSERO

PERLAKUAN AKUNTANSI

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
PERUSAHAAN

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. PLN Distribusi Takalar yang beralamat Sombalabella, Patallasang Takalar dilakukan selama dua bulan, mulai bulan November sampai bulan Desember 2017.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian bidang akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, pengukuran, pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu objek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari obyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis implementasi dan penerapan prosedur akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan program CSR yang dilakukan perusahaan BUMN di Surabaya dengan mengambil studi kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar. Metode kualitatif dipandang tepat untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji daripada menggunakan metode kuantitatif, dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2009).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengeksplorasi implementasi dan perlakuan akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR PT. PLN (persero) Distribusi Takalar. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam proses ini diharapkan diperoleh informasi tambahan terkait kendala teknis dalam prosedur

akuntansi yang digunakan pada pengelolaan CSR perusahaan. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang berhubungan dan bertanggung jawab dalam kegiatan dan pelaporan tanggung jawab sosial di PT. PLN (persero) Distribusi Takalar antara lain adalah bagian Keuangan dan Akuntansi, bagian KHA (komunikasi hukum dan administrasi), bagian SDM (sumber daya manusia), bagian Umum, dan bagian KSA (*knowledge, skill, and abilities*).

2. Observasi

Pengamatan secara langsung objek fisik guna memperoleh data dan informasi yang lebih konkrit. Pengamatan dilakukan langsung di Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) – Takalar. Data dan informasi yang dimaksud adalah data keuangan yang mencerminkan pengelolaan CSR hingga pelaporannya dalam laporan keuangan perusahaan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum maupun spesifik yang terkait obyek penelitian terkait pengungkapan dan pelaporan CSR pada PT. PLN (persero) Distribusi Takalar.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses observasi di obyek penelitian yang kemudian akan dianalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Takalar yang meliputi analisis terhadap pengakuan,

pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia Undang-Undang No. 40/2007 tentang peraturan pemerintah BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 dan pedoman laporan keberlanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagaimana berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh penulis dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas. Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

II. Tinjauan Pustaka

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka penulis memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan

perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

III. Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk di dalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, analisa data. Hal ini agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantar penulis pada bab berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2012. Faktor-Faktor yang Mmpengaruhi Pengungkapan Corporate Responsibility
- Anugerah. 2010. Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang listing dibeI. 01 Oktober 2017
- CSR PT. PLN (Persero). <http://www.pln.co.id/?p=129>
- Dewi. 2013. Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Reaksi Investor pada Industri Pertambangan Dsar dan Kimia yang Go Pubic Di Bursa Efek Indonesia. 11 Oktober 2017.
- Global Reporting Initiative. 2006. Sustainability Report Guidelines*
- Hery. 2008. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: LP-FEUI
- Masnila, Nelly. 2006. *Corporate Social Responsibility: An Overview from Accounting Perspective*
- Imelda. 2016. pengaruh profitabilitas dan corporate governance terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 12 Oktober 2017.
- Luhgiatno. 2007. Akuntansi Sosial Bentuk Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan (*Social Accounting is A Attention Corporate Model by Environment*). *Fokus Ekonomi*, 2(2): 1-16
- Puspitasari. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar. 15 Oktober 2017.
- PSAK 01. Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009)
- PSAK 45. *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Revisi 2010)*
- Raja. 2011. Pengaruh Karakteristik perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan yang Terdaftar Di BEI. 06 Oktober 2017.
- Rahmawati. 2015. Analisis akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. Vale Indonesia tbk. 16 Oktober 2017.

Rizky. 2013. Penerapan audit dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pada koperasi dijember. 08 Oktober 2017.

Sari, Yola. 2013. Factor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan high profil yang terdfar di BEI. 09 Oktober 2017.

SAK ETAP. *Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Revisi 2009)*

Struktur Organisasi Kementerian BUMN. <http://www.bumn.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Yasi.2014. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 12 Oktober 2017

